

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Pertama Sari
NIM : 222013173**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Pertama Sari
NIM : 222013173**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PERTAMAYA SARI

NIM : 22 2013 173

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tiada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2017

Penulis



(PERTAMAYA SARI)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi
Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Sebagai
Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di
Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Pertamina Sari
NIM : 222013173
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Maret 2017

Pembimbing,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021

Mengetahui,
Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ♥ Simpan semua kesedihan dan kesulitanmu, ceritakan kembali ketika engkau sudah meraih kesuksesanmu.
- ♥ Jadilah seperti ombak di lautan yang selalu setia pada pasir pantai.
- ♥ Jika kukumu panjang potonglah kukunya bukan jarimu, jika terjadi perdebatan potonglah egonya bukan hubungannya.

(Pertama Sari)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Mama (Baiti Yuliana) dan Papa (Ali Bundan)
tercinta
- ♥ Adikku (Raffyan Saputra) Tersayang
- ♥ Kekasihku (Prada Imam Syahwiri) Tercinta
- ♥ Teman-teman dan Sahabatku
- ♥ Almamaterku



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**. Sholawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti yang sekarang ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku dan adikku yang telah memberikan doa, semangat serta dorongan kepada peneliti. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sunardi., SE., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, diantaranya :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhirulakhir dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah swt.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2017

Penulis

Pertamaya Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Umum (<i>Grand teory</i>).....	10
2. Belanja Modal	14
3. Pendapatan Asli Daerah	17
4. Dana Alokasi Umum.....	21
5. Dana Alokasi Khusus.....	22
6. Jumlah Penduduk	23
B. Penelitian Sebelumnya	25
C. Kerangka Pikiran.....	29
D. Hipotesis	29

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	33
	B. Lokasi Penelitian.....	34
	C. Operasionalisasi Variabel	34
	D. Populasi Dan Sampel	35
	E. Data yang Diperlukan	36
	F. Metode Pengumpulan Data.....	37
	G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	45
	1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	45
	2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan.....	50
	B. Hasil Pengolaan Data	55
	1. Statitik Deskriptif.....	56
	2. Hasil Analisis Regresi Sederhana	57
	3. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	66
	4. Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Korelasi.....	70
	5. Hasil Analisis Jalur (<i>Analysis Path</i>).....	72
	C. Pembahasan Hasil Penelitian	80
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	28
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	34
Tabel III.2 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	35
Tabel III.3 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	36
Tabel III.4 Kriteria Koefisien Korelasi	43
Tabel IV.1 Daftar Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan.....	45
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif	56
Tabel IV.3 Analisis Regresi Sederhana Jumlah Penduduk	57
Tabel IV.4 Analisis Regresi Sederhana PAD.....	59
Tabel IV.5 Analisis Regresi Sederhana DAU	60
Tabel IV.6 Analisis Regresi Sederhana DAK	62
Tabel IV.7 Analisis Regresi Sederhana PAD ke Belanja Modal	63
Tabel IV.8 Analisis Regresi Sederhana DAU ke Belanja Modal	64
Tabel IV.9 Analisis Regresi Sederhana DAK ke Belanja Modal	65
Tabel IV.10 Hasil Uji t Jumlah Penduduk	67
Tabel IV.11 Hasil Uji t Jumlah Penduduk ke PAD.....	68
Tabel IV.12 Hasil Uji t Jumlah Penduduk ke DAU	69
Tabel IV.13 Hasil Uji t Jumlah Penduduk ke DAK	70
Tabel IV.14 Analisis Determinasi dan Korelasi Jumlah Penduduk	71
Tabel IV.15 Hasil Analisis Jalur PAD Intervening.....	73
Tabel IV.16 Hasil Analisis Jalur DAU Intervening	76
Tabel IV.17 Hasil Analisis Jalur DAK Intervening	78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Biodata penulis
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset
- Lampiran 3 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran
- Lampiran 4 : Sertifikat Toefl
- Lampiran 5 : Foto Copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 7 : Berita Acara Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Hasil Perhitungan Regresi
- Lampiran 9 : Data PAD, DAU, DAK, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk

ABSTRAK

Pertamaya Sari / 22 2013 173/ Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2012 – 2014. Populasi dalam penelitian ini 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2012-2014. Metode Analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Regresi Linier Sederhana, Uji Hipotesis (Uji t), Analisis Determinasi dan Korelasi, serta Analisis Jalur (Analysis Path) dan Uji Sobel Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui Dana Alokasi Umum sebagai variabel intervening, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui Dana Alokasi Khusus sebagai variabel intervening.

Kata kunci: *Jumlah Penduduk, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.*

Abstract

Pertamaya Sari / 222013173 / The Influence of Total Population toward Capital Expenditure through Local Revenues, General Allocation Fund as an Intervening Variable in Regencies /Towns in South-Sumatera Provinces

This research is aimed at finding out the influence of total population toward capital expenditure through local revenues, general allocation fund as an intervening variable in Regencies/Towns in South-Sumatera Provinces. This research used secondary data, obtained from Central Bureau of Statistics and Directorate General of Financial Considerations, 2012-2014. The population of this research was 11 regencies/town in South-Sumatera Province. The technique of analyzing the data was through descriptive statistics, simple linear regression, hypothesis test (Ttest), determination analysis and correlation as well as path analysis and sobel test. The result showed that total population had positive significant influence toward capital expenditure, and had no significant influence toward fund allocation through local revenues as an intervening variable. In practice, total population had negative, not significant influence toward general fund allocation, and total population had positive influence of capital expenditure toward specific fund allocation as an intervening variable.

Keywords: Total Population, Capital Expenditure, Local Revenues, General and Specific Fund Allocation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola keuangan yang baik bagi sektor publik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18).

Menurut teori *agency*, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2009: 4).

Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan

daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Menurut Permendagri No. 52 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah (Siregar, 2015: 31).

Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan program kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, salah satunya adalah belanja

modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2014: 107). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Siregar, 2015: 31). Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah juga diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena merupakan sumber penerimaan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya.

Dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 35). Dana Alokasi Umum merupakan penyangga utama pembiayaan APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat

berkurang. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 48).

Mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan sendiri selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah.

Beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dan pemerintah pusat sehingga menyebabkan tidak stabilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Dengan demikian kontribusi anggaran Dana Alokasi Umum menjadi stabil.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersifat khusus yang artinya penggunaan dana tersebut berdasarkan petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi, dalam hal ini pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.104 tahun 2000, DAK digunakan untuk membiayai investasi penggandaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang; dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai aset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikianrupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja

secara efektif. Anggaran belanja modal pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Jumlah penduduk di suatu provinsi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Selain itu rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk ini menurut Dirjen Perimbangan Keuangan dalam Deskripsi dan Analisis APBD 2011, rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki jumlah penduduk sekitar 8,03 juta jiwa tahun 2014 dan memiliki 17 kabupaten/kota. Artinya Provinsi Sumatera Selatan mempunyai anggaran belanja daerah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Ririn Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena ketidakmerataan kepadatan penduduk dengan kapasitas fiskal daerahnya, sehingga pemerintah Provinsi harus memprioritaskan program mereka berdasarkan karakteristik wilayah mereka. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Putra Widiagma (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga semakin tinggi

jumlah penduduk pada suatu daerah, maka belanja modal pada daerah tersebut menjadi semakin tinggi. Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Ririn Wulandari (2013) dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Putra Widiagma (2015).

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti ingin membahas tentang pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal ?
2. Bagaimanakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening ?

3. Bagaimanakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal melalui Dana Alokasi Umum sebagai variabel intervening ?
4. Bagaimanakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal melalui Dana Alokasi Khusus sebagai variabel intervening ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal melalui PAD sebagai variabel intervening.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal melalui DAU sebagai variabel intervening.
4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal melalui DAK sebagai variabel intervening.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan baik dari teori maupun dalam praktek di bidang belanja daerah.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran khususnya saat menyusun anggaran belanja modal.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahan pustaka dan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang yang berkaitan dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Umum (*Grand Theory*)

a. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menurut Mathius (2016: 2-4) pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata *Stakeholder* dapat diartikan sebagai segenap pihak yang berkaitan dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu *stakeholder* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu :

- 1) *Stakeholder* utama
- 2) *Stakeholder* pendukung (sekundera)
- 3) *Stakeholder* kunci

Teori kepentingan (*Expectancy- Value Theory*) adalah salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunaannya. Teori ini mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut.

Menurut Paton dan Mathius (2016: 4) Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*), mengemukakan bahwa

perusahaan dipandang merupakan suatu unit ekonomi terpisah yang beroperasi terutama untuk kepentingan pemegang saham. Teori entitas selalu dikaitkan partisipan dalam kegiatan ekonomi. Partisipan tersebut merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan statement laba-rugi.

b. Teori Entitas (*Entity Theory*)

Menurut Paton dalam Mathius (2016: 4) teori entitas menekankan pada konsep pengelolaan "*stewardship*" dan pertanggungjawaban "*accountability*" dimana tingkat keberlangsungan usaha dari informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan memperoleh dana dimasa depan.

Menurut Khan dalam Mathius (2016: 4-5) teori entitas dapat juga dijelaskan pengungkapan informasi yang ada di internet sehubungan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan ke pemegang amanah (*agent*) dan dalam rangka upaya untuk mencapai kebutuhan informasi pengguna, dimana kerangka peraturan yang ada telah mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna secara simultan, dan internet menawarkan siri

sebagai alat menyajikan informasi kepada pengguna dalam areal yang lebih luas dalam waktu yang sama. Menurut Lawrence dan Fogarty dalam Mathius (2016: 5) teori entitas (*Entity Theory*), menyatakan bahwa setiap entitas bisnis dalam kantor Akuntansi Publik menjalankan aktivitas usahanya untuk memenuhi berbagai pihak yang berkepentingan.

c. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Mathius (2016: 5) *agency theory* merupakan implementasi dalam organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Jansen dan Meckling dalam Mathius (2016: 6) memandang teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak) dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat juga dikatakan bahwa *principal*

memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Kaitan *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2. Belanja Modal

Menurut Siregar (2015: 29), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2014: 107), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Siregar (2015: 167), belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah “beban modal” sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif,

keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.

Belanja modal dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori aset tetap adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah terdiri atas belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah gandum, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin meliputi belanja modal pengadaan alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi, senjata api, senjata sinar, alat keamanan dan perlindungan dan sebagainya.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat

tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja ini meliputi pengadaan jalan, jembatan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan air, instalasi air kotor, instalasi gas, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan gas dan sebagainya.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetaplainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan dan tanaman.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian berarti, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 35). Menurut Siregar (2015: 31), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Menurut Halim (2012: 101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi

asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Pajak kendaraan di air
- 3) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 4) Bea balik nama kendaraan di air
- 5) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 6) Pajak air permukaan
- 7) Pajak rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan

- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- 7) Pajak lingkungan
- 8) Pajak mineral
- 9) Pajak parker
- 10) Pajak sarang burung wallet
- 11) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- 12) BPHTB

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau milik kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan dalam Deskripsi dan Analisis APBD 2011, Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio

transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 35). Desentralisasi adalah penyerahaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8).

DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. DAU merupakan dana yang ditujukan untuk pemeratakan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. DAU diberikan berdasarkan kebutuhan daerah yang menjadi target pemberian. Kebutuhan daerah diukur melalui luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Kebijakan alokasi DAU diberikan dengan menggunakan proporsi terbaik, dimana daerah miskin akan menerima DAU lebih besar daripada daerah yang kaya. Semakin kaya suatu daerah maka DAU yang di alokasikan semakin kecil.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa kebutuhan DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal sebagaimana dalam undang-undang adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontribusi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 48). Menurut Siregar (2015: 144), DAK merupakan dana yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar. Pendapatan DAK meliputi pendapatan untuk berbagai bidang DAK seperti infrastruktur jalan, irigasi, air, sanitasi, kehutanan, perumahan, kesehatan, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan, transportasi pedesaan, perdagangan, lingkungan

hidup, pertanian, energi pedesaan, sarana dan prasarana kawasan perbatasan, pendidikan, serta keselamatan transportasi darat.

6. Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Dalam hal ini, berarti jumlah penduduk disuatu provinsi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam pengumpulan data penduduk bisa dilakukan dengan tiga cara/metode yakni:

- a. Sensus, yaitu pendataan penduduk secara menyeluruh.
- b. Survei, yaitu pendataan penduduk secara sampel.
- c. Sistem Registrasi Penduduk, yaitu pendataan penduduk berdasarkan catatan resmi pada instansi-instansi yang berwenang misalnya kelurahan.

Sensus penduduk di Indonesia hanya dilakukan 10 tahun sekali, sehingga jumlah penduduk per tahun didapat berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk. Tersedianya data kependudukan yang akurat sangat

membantu dalam tercapainya perencanaan pembangunan nasional.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk antara lain:

- a. Kelahiran (*fertilitas*)
- b. Kematian (*mortalitas*)
- c. Perpindahan (*migration*)

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan dalam Deskripsi dan Analisis APBD 2011, rasio belanja modal perkapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio belanja modal perkapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) yang menyatakan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat. Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah (*Population Reference Bureau (PRB) 2011*).

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013). Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Penelitian sebelumnya berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Meianto dkk (2014). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah secara parsial Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan ? Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah secara simultan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ada tidaknya pengaruh Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini bahwa secara parsial PAD dan Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan DAK tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian sebelumnya berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Aditya Putra Widiagma (2015). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

dari Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menyebabkan semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk pada suatu daerah, maka Belanja Modal pada daerah tersebut menjadi semakin tinggi.

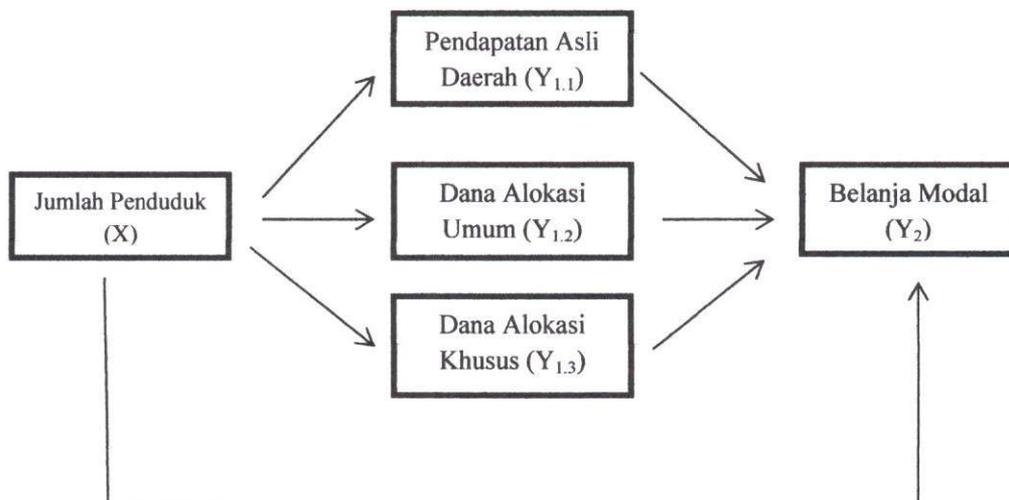
Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Arbie Gugus Wandira, 2013)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Sama-sama menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal.	Sebelumnya mengambil studi kasus di pemerintah provinsi se-indonesia dan variabel independen yaitu Jumlah Penduduk.
2.	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Meianto dkk, 2014)	Hasil penelitian ini bahwa secara parsial PAD dan Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan DAK tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Sama-sam a meneliti tentang PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal.	Perbedaannya terletak pada variabel independennya.
3.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Aditya Putra Widiagma, 2015)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menyebabkan semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk pada suatu daerah, maka Belanja Modal pada daerah tersebut menjadi semakin tinggi.	Sama-sama menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal.	Perbedaannya pada variabel independennya yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Sumber : Penulis, 2017

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 Kerangka Pikiran



Sumber : *Penulis 2017*

D. Hipotesis

Menurut Sugiono (2014: 93), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa salah satu indikator penentuan kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Daerah dengan luas wilayah yang lebih padat penduduknya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang

kepadatan penduduknya yang lebih kecil. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widiagma (2015) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut.

H 1 : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

2. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antar keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. Menurut Asmuruf dkk (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan menurut Meianto (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara lebih mengoptimalkan dalam memanfaatkan kekayaan dan potensi sumber daya alam yang ada di daerah yang nantinya akan kembali pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

H2 : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening.

3. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal melalui Dana Alokasi Umum sebagai variabel intervening.

DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin besar jumlah Dana Alokasi umum yang diperoleh pemerintah provinsi maka akan semakin besar pula belanja modal pemerintah provinsi. Begitupula dengan jumlah penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk disuatu wilayah maka transfer penerimaan DAU juga akan semakin besar sehingga pengeluaran untuk belanja modal pun meningkat.

H3 : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Intervening

4. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal melalui Dana Alokasi Khusus sebagai variabel intervening.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Provinsi yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Karena semakin tinggi jumlah penduduk disuatu wilayah maka transfer penerimaan DAK juga akan semakin besar sehingga pengeluaran untuk belanja modal pun meningkat.

H4 : Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2014: 53-55), jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, karena untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal melalui pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) sebagai variabel intervening, serta untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi belanja modal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No.1694/1131, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114 telp (0711 351665) dan Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan yang dapat diakses melalui situs resmi pemerintah www.djpk.depkeu.go.id.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Jumlah Penduduk (X)	Total semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.	Total Penduduk per tahun.
2.	Pendapatan Asli Daerah ($Y_{1,1}$)	Penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.	1. Pajak daerah; 2. Retribusi daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4. Lain-lain PAD yang sah.
3.	Dana Alokasi Umum ($Y_{1,2}$)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Transfer DAU dari Pemerintah Pusat.
4.	Dana Alokasi Khusus ($Y_{1,3}$)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Transfer DAK dari Pemerintah Pusat.
5.	Belanja Modal (Y_2)	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	Total Belanja Modal.

Sumber : Penulis 2017

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2014: 389), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan adalah 17 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan dan menggunakan *time series* sebanyak 3 tahun dari 2012-2014. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD di dalam situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Tabel III.2
Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012-2014

No.	Kabupaten/kota
1	Kabupaten Lahat
2	Kabupaten Musi Rawas
3	Kabupaten Muara Enim
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu
6	Kabupaten Empat Lawang
7	Kabupaten Banyuasin
8	Kabupaten OKU Timur
9	Kabupaten Ogan Ilir
10	Kota Lubuk Linggau
11	Kota Palembang
12	Kota Prabumulih
13	Kota Pagar Alam
14	Kabupaten OKU Selatan
15	Kabupaten PALI
16	Kabupaten Musi Rawas Utara
17	Kanupaten Musi Banyuasin

Sumber: Penulis 2017

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2014: 389), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan adalah 17 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan dan menggunakan *time series* sebanyak 3 tahun dari 2012-2014. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD di dalam situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Tabel III.2
Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012-2014

No.	Kabupaten/kota
1	Kabupaten Lahat
2	Kabupaten Musi Rawas
3	Kabupaten Muara Enim
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu
6	Kabupaten Empat Lawang
7	Kabupaten Banyuasin
8	Kabupaten OKU Timur
9	Kabupaten Ogan Ilir
10	Kota Lubuk Linggau
11	Kota Palembang
12	Kota Prabumulih
13	Kota Pagar Alam
14	Kabupaten OKU Selatan
15	Kabupaten PALI
16	Kabupaten Musi Rawas Utara
17	Kanupaten Musi Banyuasin

Sumber: *Penulis 2017*

2. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal yang digunakan sebagai data penelitian ini secara berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan 2014.

Tabel III.3
Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012-2014

No.	Kabupaten/kota
1	Kabupaten Lahat
2	Kabupaten Musi Rawas
3	Kabupaten Muara Enim
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu
6	Kabupaten Empat Lawang
7	Kabupaten Banyuasin
8	Kabupaten OKU Timur
9	Kabupaten Ogan Ilir
10	Kota Lubuk Linggau
11	Kota Palembang

Sumber: *Penulis 2017*

Berdasarkan kriteria diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 11 Kabupaten/Kota selama 3 tahun berturut-turut sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 data sampel Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

E. Data yang Diperlukan

Menurut Indrianto dan Bambang (2009: 145-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu berupa laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang diakses melalui situs resmi pemerintah www.djpk.depkeu.go.id dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Adapun data yang diperlukan adalah nilai PAD, DAU, DAK, Jumlah Penduduk, dan Belanja Modal tahun 2012 sampai dengan 2014.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2014: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat tau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, berupa pengumpulan data-data dan laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiono (2014: 13-14) jenis penelitian menurut metode dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan.

Dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif, karena analisis yang dilakukan menggunakan rumus-rumus statistika yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah untuk mempertimbangkan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh, serta hasil data realisasi akan dijelaskan dengan kalimat-kalimat kualitatif.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif untuk mengetahui nilai maksimum minimum rata-rata, dan standar deviasi (*standard deviation*) dari variabel-variabel penelitian, kemudian analisis regresi sederhana untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dan selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t) untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan, serta dilakukan pula pengujian analisis jalur (*analysis path*) untuk dapat menemukan pengaruh tidak langsung dalam hubungan antar variabel melalui variabel perantara dan dilanjutkan dengan uji *sobel test* (uji sobel) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh mediasi antar variabel melalui variabel perantara.

a. Statistik Deskriptif

Menurut Sujarweni (2015: 225), Statistik Deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.

b. Regresi Linier Sederhana

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015: 171), analisis regresi sederhana merupakan analisis regresi yang menyangkut sebuah variabel independen dan sebuah variabel dependen dinamakan analisis regresi sederhana. Hubungan stokhastik dari variabel-variabel tersebut adalah :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = variabel terikat (Belanja Modal)

a = Bilangan konstanta

X = Variabel bebas (Jumlah Penduduk)

b = Bilangan konstanta

e = *Disturbance term*

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Sujarweni (2015: 225), metode analisis data Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen Ghozali (2005). Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) $> 0,05$.

Kriteria :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

- 1) Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Korelasi

Menurut Sujarweni (2015: 225), Koefisien determinasi (*Goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen Ghazali (2005).

Menurut Pardede dan Renhard (2014: 31-32) menyatakan bahwa analisis korelasi ini merupakan jenis analisis korelasi yang paling banyak digunakan. Dasar pemikiran analisis korelasi *product*

moment adalah perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Jika persentase perubahan variabel diikuti dengan perubahan variabel lain dengan persentase yang sama persis berarti kedua variabel itu memiliki korelasi sempurna (atau memiliki korelasi 1) oleh karena itu, jika sebuah variabel dikorelasikan dengan variabel itu sendiri (X dengan X, atau Y dengan Y) maka akan menghasilkan nilai korelasi sempurna atau 1. Untuk mencari koefisien korelasi *product moment* digunakan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (n \sum x)^2]} \sqrt{[n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi *product moment*

n = Jumlah pengamatan

\sum_x = Jumlah Pengamatan dari nilai X

\sum_y = Jumlah Pengamatan dari nilai Y

r_{xy} merupakan koefisien korelasi nilainya akan senantiasa berkisar antara -1 sampai dengan 1. Bila koefisien korelasi semakin mendekati angka 1 berarti korelasi tersebut semakin kuat, tetapi jika koefisien korelasi tersebut mendekati angka 0 berarti korelasi tersebut semakin lemah. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemberian katagori koefisien korelasi maka dibuat kriteria pengukuran berikut :

Tabel III.4
Kriteria Koefisien Korelasi

Nilai r	Kriteria
0,00 s.d 0,29	Korelasi Sangat Lemah
0,30 s.d 0,49	Korelasi Lemah
0,50 s.d 0,69	Korelasi Cukup
0,70 s.d 0,79	Korelasi Kuat
0,80 s.d 1,00	Korelasi Sangat Kuat

e. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Menurut Pardede dan Renhard (2014: 16) menyatakan bahwa analisis jalur adalah salah satu teknik analisis kuantitatif, merupakan pengembangan dari regresi linier berganda. Teknik ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan regresi linier karena model analisis jalur dapat menemukan pengaruh tidak langsung dalam hubungan antar variabel melalui variabel perantara. Menurut Robert D.R. 1993 dalam Pardede dan Renhard (2014: 16) analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung.

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi analisis jalur bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas sig. dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau ($0,05 \leq \text{sig}$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau ($0,05 \geq \text{sig}$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.

f. Sobel Test (uji sobel)

Menurut Ghozali (2013: 255) Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Dimana Sobel test menggunakan koefisien indirect effect ($Sp2p3$) dengan rumus sebagai berikut :

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

Keterangan :

$p2$ = koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi

$p3$ = koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen

$Sp2$ = *standard error of estimation* dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi

$Sp3$ = *standard error of estimation* dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

a. Keadaan Geografi

Secara geografis, provinsi Sumatera Selatan terletak diantara 1°- 4° LS dan antara 102° dan 106° BT dengan luas daerah seluruhnya 87.017,41 hektar. Letak provinsi ini berbatasan dengan provinsi Jambi di sebelah utara, provinsi Lampung di sebelah selatan, provinsi Bangka Belitung di sebelah timur dan provinsi Bengkulu disebelah barat.

b. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Tabel IV.1
Daftar Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kabupaten Lahat	4 297, 12	21	359	17
Kabupaten Musi Rawas	6 330, 53	21	268	20
Kabupaten Muara Enim	6 901, 36	22	310	16
Kabupaten Ogan Komering Ilir	17 086, 39	18	297	13
Kabupaten Ogan Komering Ulu	3 747, 77	12	140	14
Kabupaten Empat Lawang	2 312, 20	10	147	8
Kabupaten Banyuasin	12 361, 43	17	288	16
Kabupaten OKU Timur	3 397, 10	20	289	7
Kabupaten Ogan Ilir	2 411, 24	16	227	14
Kota Lubuk Linggau	365, 49	8	-	72
Kota Palembang	363, 68	16	-	107

Sumber : BPS Sumatera Selatan

c. Wilayah Administrasi

Seperti halnya provinsi-provinsi lain di Indonesia, Sumatera Selatan dibagi menjadi kabupaten dan kota. Kabupaten/kota dibagi menjadi kecamatan-kecamatan, dan selanjutnya kecamatan dibagi lagi menjadi desa-desa dan kelurahan-kelurahan. Jumlah kabupaten di Sumatera Selatan mencapai 13 kabupaten dan 4 kota pada tahun 2014. Secara total, jumlah wilayah administrasi di Sumatera Selatan sampai bulan juni tahun 2015 mencapai 2.872 desa, 385 kelurahan, dan 231 kecamatan.

d. Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Selama empat tahun terakhir, PDRB Sumsel dengan migas atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai tambah yang terbentuk sebesar 226,67 triliun rupiah. Pada tahun 2012 angka ini sebesar 253,26 triliun rupiah dan tahun 2013 sebesar 281,99 triliun rupiah. Pada tahun 2014, nilainya menjadi sebesar 308,41 triliun rupiah.

Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap

PDRB. Pada tahun 2014, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor pertambangan, diikuti oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sektor industri pengolahan serta sektor konstruksi. Pada tahun 2014 kontribusi masing-masing sektor di atas secara berurutan adalah 23,97 persen, 17,81 persen, 17,47 persen dan 13,32 persen. Dibanding kondisi tahun sebelumnya, peran sektor konstruksi dan industri tanpa migas meningkat masing-masing sebesar 5,7 persen dan 4,43 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian menurun masing-masing sebesar 3,73 persen dan 5,52 persen.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Selatan pada 2013 telah kembali pada tren jangka panjangnya, hal ini ditunjukkan dari angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dengan migas menurun dibanding tahun 2013 dari 5,98 persen menjadi 4,68 persen di tahun 2014. Begitu juga pertumbuhan ekonomi tanpa migas menurun dari sebesar 7,34 persen di tahun 2013 menjadi 5,35 persen di tahun 2014.

Tiga sektor besar yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pengilangan migas, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial serta

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor pengilangan migas meningkat dari sebesar 0,10 persen tahun 2013 menjadi 1,48 persen tahun 2014, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial meningkat dari sebesar 0,74 persen tahun 2013 menjadi 6,20 persen tahun 2014, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat dari sebesar 3,00 persen tahun 2013 menjadi 5,63 persen tahun 2014. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah jasa keuangan dan asuransi dari sebesar 10,39 persen tahun 2013 menjadi 3,96 persen tahun 2014 atau menurun sebesar 61,89.

f. Kependudukan

Jumlah penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada tahun 2014, provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 8,03 juta jiwa atau naik sebesar 1,19 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 7,93 juta jiwa, diikuti provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk 7,94 juta jiwa atau naik 1,44 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 7,83 juta jiwa. Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terkecil, yaitu 1,34 juta jiwa pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2013 sebesar 1,31 juta

jiwa. jumlah penduduk provinsi Jambi pada tahun 2014 adalah 3,34 juta jiwa atau bertambah sebesar 1,52 persen dibanding tahun 2013, sedangkan jumlah penduduk provinsi Bengkulu tahun 2014 adalah 1,84 juta jiwa atau mengalami penambahan penduduk 1,66 persen.

g. Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah laju pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan laju inflasi. PDRB sering dipakai sebagai indikator kemakmuran suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar harga berlaku) provinsi-provinsi di wilayah sumatera bagian selatan menunjukkan penurunan pada tahun 2014. Provinsi Lampung mencatat laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2014 sebesar 5,08 persen.

Berdasarkan urutannya untuk wilayah sumatera bagian selatan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi berada pada urutan teratas dengan nilai 7,76 persen, diikuti provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan dengan laju pertumbuhan masing-masing 5,49 persen dan 4,68 persen. Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Bangka Belitung sebesar 4,68 persen.

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan

a. Visi

Visi Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

**“SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN
BERDAYA SAING INTERNASIONAL”**

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- 1) **Sejahtera** mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh

toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

- 2) **Lebih maju** adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.
- 3) **Berdaya Saing Internasional** menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperan serta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung didalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai:

- (1) Kemakmuran Daerah
- (2) Kesejahteraan Rakyat
- (3) Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional

b. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Memantapkan stabilitas daerah;
- c. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan;
- d. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana.

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja,

serta peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah industri, peningkatan perdagangan antarwilayah, dan peningkatan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan stabilitas daerah

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta stabilitas politik melalui: pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada dengan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga

dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB).

Misi 3: Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaatan; peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk kerjasama dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

B. Hasil Pengolaan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan diolah berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan situs resmi pemerintah www.djpk.depkeu.go.id. yang menjadi sampel penelitian yang meliputi data :

1. Jumlah Penduduk dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten/kota dari tahun 2012 sampai tahun 2014.
2. Pendapatan Asli Daerah dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten/kota dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

3. Dana Alokasi Umum dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten/kota dari tahun 2012 sampai tahun 2014.
4. Dana Alokasi Umum dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten/kota dari tahun 2012 sampai tahun 2014.
5. Alokasi Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten/kota dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

1. Statistik Deskriptif

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah 33 data dari 11 kabupaten dalam waktu 3 tahun dari tabel IV.2 menunjukkan hasil statistik deskriptif yaitu nilai maksimum minimum rata-rata, dan standar deviasi (*Standard Deviation*) dari variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut meliputi Jumlah Penduduk, PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal.

Tabel IV.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penduduk	33	208893	1558491	578747.79	360617.350
PAD	33	21467	734219	117397.33	162680.084
DAU	33	274671	1203662	612522.70	220285.169
DAK	33	9266	147190	63219.94	29689.592
Belanja Modal	33	162347	819081	398949.27	163997.807
Valid N (listwise)	33				

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan tabel IV.2 dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 33, diperoleh gambaran nilai mean serta standar deviasi masing-masing variabel yaitu Jumlah Penduduk, PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal.

2. Hasil Analisis Regresi Sederhana

a. Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Pengolaan data dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk meyakinkan bahwa variabel bebas yaitu jumlah penduduk (X_1) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu alokasi belanja modal (Y_2). Hasil regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel IV.3
Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	261840.810	47341.131		5.531	.000
Jumlah Penduduk	.237	.070	.521	3.398	.002

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu:

$$Y = 261840,810 + 0,237$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa hasil interpretasi dari nilai regresi adalah :

1) Konstanta (c)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Y) sebesar 261840,810. Artinya alokasi

belanja modal mengalami kenaikan sebesar 261840,810 kenaikan ini terjadi karena jumlah penduduk yang selalu meningkat di setiap tahunnya sehingga akan mempengaruhi pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.

2) Jumlah Penduduk (X_1) terhadap Alokasi Belanja Modal (Y_2)

Nilai koefisien untuk variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar 0,237, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk per jiwa maka alokasi belanja modal akan naik sebesar 0,237. Hal ini disebabkan bahwa besarnya jumlah penduduk akan berhadapan langsung dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hal ini berarti dengan bertambahnya jumlah penduduk maka belanja modal pun akan meningkat.

b. Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Pengolaan data dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk meyakinkan bahwa variabel bebas yaitu jumlah penduduk (X_1) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah ($Y_{1.1}$). Hasil uji regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel IV.4
Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-109950.345	27048.493		-4.065	.000
1 Jumlah Penduduk	.393	.040	.871	9.861	.000

a. Dependent Variabel: PAD

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu:

$$Y = -109950,345 + 0,393X$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa hasil interpretasi dari nilai regresi adalah :

1) Konstanta (c)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Y) sebesar -109950,345. Artinya pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar -109950,345 penurunan ini terjadi karena kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah, kebanyakan dari mereka yang menunda pembayaran pajak sehingga pendapatan asli daerah menjadi menurun.

2) Jumlah Penduduk (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah ($Y_{1,1}$)

Nilai koefisien untuk variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar 0,393, hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah juga akan kenaikan sebesar 0,393. Akan tetapi dari hasil regresi menunjukkan bahwa terjadi

penurunan terhadap pendapatan asli daerah, artinya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak selalu dilihat dari sisi jumlah penduduk suatu daerah akan tetapi dari sisi lain diluar penelitian ini.

c. Jumlah Penduduk Terhadap DAU

Pengolaan data dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk meyakinkan bahwa variabel bebas yaitu jumlah penduduk (X_1) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Dana Alokasi Umum ($Y_{1,2}$). Hasil regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel IV.5
Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	284942.686	28015.257		10.171	.000
1 Jumlah Penduduk	.566	.041	.927	13.719	.000

a. Dependent Variabel: DAU

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu:

$$Y = 284942,686 + 0,566$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa hasil interpretasi dari nilai regresi adalah :

1) Konstanta (c)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Y) sebesar 284942,686. Artinya dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 284942,686 kenaikan ini terjadi karena jumlah penduduk yang selalu meningkat di setiap provinsi hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan transfer DAU yang lebih besar dari pemerintah pusat.

2) Jumlah Penduduk (X_1) terhadap Dana Alokasi Umum ($Y_{1,2}$)

Nilai koefisien untuk variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar 0,566 hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk maka dana alokasi umum yang diterima juga akan naik sebesar 0,566. Hal ini disebabkan karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan lain berupa Dana Alokasi Umum.

d. Jumlah Penduduk Terhadap DAK

Pengolaan data dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk meyakinkan bahwa variabel bebas yaitu jumlah penduduk (X_1) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Dana Alokasi Khusus ($Y_{1,3}$). Hasil regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel IV.6
Analisis Regresi Sederhana

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51662.755	9740.605		5.304	.000
	Jumlah Penduduk	.020	.014	.243	1.392	.174

a. Dependent Variabel: DAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu:

$$Y = 51662,755 + 0,020$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa hasil interpretasi dari nilai regresi adalah :

1) Konstanta (c)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Y) sebesar 51662,755. Artinya dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar 51662,755 kenaikan ini terjadi karena jumlah penduduk yang selalu meningkat di setiap provinsi hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan transfer DAK yang lebih besar dari pemerintah pusat.

2) Jumlah Penduduk (X_1) terhadap Dana Alokasi Khusus ($Y_{1.3}$)

Nilai koefisien untuk variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar 0,020 hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk maka dana alokasi khusus yang diterima juga akan naik sebesar 0,020.

e. PAD Terhadap Belanja Modal

Hasil uji regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel IV.7
Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	343874.057	31828.788		10.804	.000
PAD	.469	.160	.465	2.927	.006

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu:

$$Y = 343874,057 + 0,469$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa hasil interpretasi dari nilai regresi adalah :

1) Konstanta (c)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Y) sebesar 343874,057. Artinya alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 343874,057 kenaikan ini terjadi karena pendapatan asli daerah yang selalu meningkat di setiap tahunnya sehingga akan mempengaruhi peningkatan belanja modal daerah pula.

2) Pendapatan Asli Daerah ($Y_{1.1}$) terhadap Alokasi Belanja Modal (Y_2)

Nilai koefisien untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,469 hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan Pendapatan

Asli Daerah maka alokasi belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan juga akan naik sebesar 0,469. Hal ini disebabkan karena tingkat kemandirian daerah yang semakin besar sehingga belanja daerah yang dikeluarkan juga akan semakin besar.

f. DAU Terhadap Belanja Modal

Hasil uji regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel IV.8
Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	122252.785	69063.517		1.770	.087
1 DAU	.452	.106	.607	4.250	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Berdasarkan table IV.8 dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu:

$$Y = 122252,785 + 0,452$$

Dari persamaan tersebut maka dapat diketahui bahwa hasil interpretasi dari nilai regresi adalah :

1) Konstanta (c)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Y) sebesar 122252,785 Artinya alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 122252,785 kenaikan ini terjadi karena dana alokasi umum yang diterima meningkat di

setiap tahunnya sehingga akan mempengaruhi peningkatan belanja modal daerah pula.

- 2) Dana Alokasi Umum ($Y_{1,2}$) terhadap Alokasi Belanja Modal (Y_2)
 Nilai koefisien untuk variabel Dana Alokasi Umum adalah sebesar 0,452, hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan dana alokasi umum yang diterima maka alokasi belanja modal pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan daerah yang semakin meningkat sehingga DAU yang diterima akan lebih besar.

g. DAK Terhadap Belanja Modal

Hasil uji regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel IV.9
Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	259628.512	63364.578		4.097	.000
	DAK	2.204	.910	.399	2.422	.021

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu:

$$Y = 259628,512 + 2,204$$

Dari persamaan tersebut maka dapat diketahui bahwa hasil interpretasi dari nilai regresi adalah :

1) Konstanta (c)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Y) sebesar 259628,512. Artinya alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 259628,512 kenaikan ini terjadi karena dana alokasi khusus yang diterima meningkat di setiap tahunnya sehingga akan mempengaruhi peningkatan belanja modal daerah pula.

2) Dana Alokasi Khusus ($Y_{1,3}$) terhadap Alokasi Belanja Modal (Y_2)

Nilai koefisien untuk variabel Dana Alokasi Khusus adalah sebesar 2,204, hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan dana alokasi khusus yang diterima maka alokasi belanja modal pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan daerah dalam penyediaan layanan dasar yang semakin meningkat sehingga DAK yang diterima akan lebih besar.

3. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) > 0,05.

Kriteria :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil uji statistik t merupakan suatu bentuk analisis parsial untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Hasil uji t berguna untuk mengetahui apakah secara individual variabel (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel (Y) atau tidak.

a. Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Besarnya koefisien parsial dan hasil uji statistik t dengan menggunakan SPSS disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel IV.10

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	261840.810	47341.131		5.531	.000
Jumlah Penduduk	.237	.070	.521	3.398	.002

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Dari tabel IV.10 *coefficients regression* dapat diketahui nilai statistik t_{hitung} sebesar 3,398 (lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,039) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,237) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,398 > 2,039$) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y).

b. Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Besarnya koefisien parsial dan hasil uji statistik t dengan menggunakan SPSS disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel IV.11
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-109950.345	27048.493		-4.065	.000
Jumlah Penduduk	.393	.040	.871	9.861	.000

a. Dependent Variabel: PAD

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Dari tabel IV.11 *coefficients regression* dapat diketahui nilai statistik t_{hitung} sebesar 9,861 (lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,039) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,393) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,861 > 2,039$) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

c. Jumlah Penduduk Terhadap DAU

Besarnya koefisien parsial dan hasil uji statistik t dengan menggunakan SPSS disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel IV.12
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	284942.686	28015.257		10.171	.000
Jumlah Penduduk	.566	.041	.927	13.719	.000

a. Dependent Variabel: DAU

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Dari tabel IV.12 *coefficients regression* dapat diketahui nilai statistik t_{hitung} sebesar 13,719 (lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,039) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap DAU. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,566) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,719 > 2,039$) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap DAU.

d. Jumlah Penduduk Terhadap DAK

Besarnya koefisien parsial dan hasil uji statistik t dengan menggunakan SPSS disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel IV.13
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	51662.755	9740.605		5.304	.000
Jumlah Penduduk	.020	.014	.243	1.392	.174

a. Dependent Variabel: DAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Dari tabel IV.13 *coefficients regression* dapat diketahui nilai statistik t_{hitung} sebesar 1,392 (lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,039) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap DAK. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,174 lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,020) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,392 < 2,039$) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap DAK.

4. Uji Koefisien Determinasi dan Korelasi

Menurut Sujarweni (2015: 225), Koefisien determinasi (*Goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel

dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen Ghozali (2005).

Menurut Pardede dan Renhard (2014: 31-32) menyatakan bahwa analisis korelasi ini merupakan jenis analisis korelasi yang paling banyak digunakan. Dasar pemikiran analisis korelasi *product moment* adalah perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Jika persentase perubahan variabel diikuti dengan perubahan variabel lain dengan persentase yang sama persis berarti kedua variabel itu memiliki korelasi sempurna (atau memiliki korelasi 1) oleh karena itu, jika sebuah variabel dikorelasikan dengan variabel itu sendiri (X dengan X, atau Y dengan Y) maka akan menghasilkan nilai korelasi sempurna atau 1.

Tabel IV.14
Analisis Determinasi dan Korelasi Jumlah Penduduk

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.521 ^a	.271	.248	142227.884

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Berdasarkan tabel IV.14 dapat dilihat nilai R sebesar 0,521 yang berarti mendekati 1, nilai R semakin mendekati 1 berarti hubungan yang

terjadi cukup kuat, sebaliknya nilai R semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi sangat lemah. Nilai R sebesar 0,521 menggambarkan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap alokasi belanja modal. Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,271 menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi alokasi belanja modal sebesar 27,1%, sedangkan sisanya 72,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar penelitian ini.

5. Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Menurut Pardede dan Renhard (2014: 16) menyatakan bahwa analisis jalur adalah salah satu teknik analisis kuantitatif, merupakan pengembangan dari regresi linier berganda. Teknik ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan regresi linier karena model analisis jalur dapat menemukan pengaruh tidak langsung dalam hubungan antar variabel melalui variabel perantara.

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi analisis jalur bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas sig. dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau ($0,05 \leq \text{sig}$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau ($0,05 \geq \text{sig}$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.

a. Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*) variabel Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD sebagai Variabel Intervening

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_0 : Jumlah Penduduk Tidak Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening.

H_a : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening.

Tabel IV.15
Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	267224.425	59561.148		4.487	.000
1 Jumlah Penduduk	.218	.144	.479	1.511	.141
PAD	.049	.319	.049	.153	.879

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Dari hasil output SPSS di atas diperoleh nilai *Standardized Coefficients Beta* untuk jumlah penduduk sebesar 0,479 dan nilai

signifikan sebesar $0,141 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya nilai *Standardized Coefficients Beta* untuk PAD sebesar 0,049 dan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,879 > 0,05$ maka dapat disimpulkan PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Hasil analisis jalur (*analisis path*) menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke PAD (sebagai variabel *intervening*) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,479 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,871) \times (0,049) = 0,043$. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = $0,479 + 0,043 = 0,522$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel PAD dapat menjadi variabel *intervening* atau PAD dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal.

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien ($p_2 \times p_3$) sebesar 0,043 signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test sebagai berikut :

Hitung standar error dari koefisien indirect effect (S_{p2p3}) :

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,049)^2(0,040)^2 + (0,393)^2(0,319)^2 + (0,040)^2(0,319)^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,0000038416) + (0,015716884) + (0,0001628176)}$$

$$Sp2p3 = 0,126029929$$

Berdasarkan hasil $Sp2sp3$ ini kita dapat menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,043}{0,126029929} = 0,341188798$$

Oleh karena t hitung = 0,341188798 lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,043 tidak signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi.

b. Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*) variabel Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui DAU sebagai Variabel Intervening

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_0 : Jumlah Penduduk Tidak Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Intervening.

H_a : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Intervening.

Tabel IV.16
Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	75720.446	92430.709		.819	.419
1 Jumlah Penduduk	-.133	.174	-.292	-.764	.451
DAU	.653	.285	.877	2.296	.029

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Dari hasil output SPSS tabel IV.16 diperoleh nilai *Standardized Coefficients Beta* untuk jumlah penduduk sebesar -0,133 dan nilai signifikan sebesar $0,451 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya nilai *Standardized Coefficients Beta* untuk DAU sebesar 0,653 dan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,029 < 0,05$ maka dapat disimpulkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke DAU (sebagai variabel intervening) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah -0,292 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,927) \times (0,877) = 1,804$. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih kecil dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya

adalah hubungan tidak langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = $-0,292 + 1,804 = 1,512$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAU dapat menjadi variabel *intervening* atau DAU dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal.

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien ($p_2 \times p_3$) sebesar 1,804 signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test sebagai berikut :

Hitung standar error dari koefisien indirect effect (Sp_{2p3}) :

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_3^2 Sp_2^2 + p_2^2 Sp_3^2 + Sp_2^2 Sp_3^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,653)^2(0,041)^2 + (0,566)^2(0,258)^2 + (0,041)^2(0,258)^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,000716793529) + (0,021324176) + (0,000111894084)}$$

$$Sp_{2p3} = 0,148838378$$

Berdasarkan hasil Sp_{2p3} ini kita dapat menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{p_2 p_3}{Sp_{2p3}} = \frac{1,804}{0,148838378} = 12,12052983$$

Oleh karena t hitung = 12,12052983 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 1,804 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi.

c. Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*) variabel Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui DAK sebagai Variabel Intervening

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_0 : Jumlah Penduduk Tidak Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening.

H_a : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening.

Tabel IV.17
Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	179184.209	62759.341		2.855	.008
1 Jumlah Penduduk	.205	.069	.451	2.971	.006
DAK	1.600	.838	.290	1.909	.066

a. Dependent Variabel: Belanja Modal
Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS Versi 20, 2017

Dari hasil output SPSS di atas diperoleh nilai *Standardized Coefficients Beta* untuk jumlah penduduk sebesar 0,451 dan nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ maka dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya nilai *Standardized Coefficients Beta* untuk DAK sebesar 0,290 dan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,066 > 0,05$ maka dapat

disimpulkan DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke DAK (sebagai variabel *intervening*) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,451 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalihkan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,243) \times (0,290) = 0,070$. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = $0,451 + 0,070 = 0,521$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAK dapat menjadi variabel *intervening* atau DAK dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal.

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien ($p_2 \times p_3$) sebesar 0,070 signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test sebagai berikut :

Hitung standar error dari koefisien indirect effect ($S_{p_2p_3}$) :

$$Sp_{2p_3} = \sqrt{p_3^2 Sp_2^2 + p_2^2 Sp_3^2 + Sp_2^2 Sp_3^2}$$

$$Sp_{2p_3} = \sqrt{(1,600)^2(0,014)^2 + (0,020)^2(0,838)^2 + (0,014)^2(0,838)^2}$$

$$Sp_{2p_3} = \sqrt{(0,00050176) + (0,0002808976) + (0,000137639824)}$$

$$Sp2p3 = 0,030336404$$

Berdasarkan hasil $Sp2p3$ ini kita dapat menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,070}{0,030336404} = 2,307458722$$

Oleh karena t hitung = 2,307458722 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,070 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 sampai dengan 2014 dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi $Y = 261840,810 + 0,237X$. Untuk hasil pengujian hipotesis (uji t) nilai t_{hitung} sebesar 3,398 (lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,039) maka H_0 ada didaerah penolakan, berarti H_a diterima artinya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi

sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,237) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,398 > 2,039$) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y).

Sesuai dengan Teori Keagenan (Agency Theory) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak prinsipal yang memberikan tugas legislatif (DPRD) untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi eksekutif (Pemerintah Daerah) yang menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan atau pelayanan publik. Pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah) harus benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Semakin banyak masyarakat pada suatu daerah, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin dipenuhi. Maka dari itu, pihak legislatif dan eksekutif membuat kebijakan yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, informasi mengenai jumlah penduduk sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Mengingat bahwa besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana

dan prasarana (infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah provinsi Sumatera selatan perlu mempertimbangkan Jumlah Penduduk di daerahnya dalam mengambil keputusan untuk penggunaan belanja modalnya.

Dengan diterimanya H_a , maka hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Widiagma (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Ririn Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa kecepatan penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena ketidakmerataan kepadatan penduduk dengan kapasitas fiskal daerahnya, sehingga pemerintah provinsi harus memprioritaskan program mereka berdasarkan karakteristik wilayah mereka.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi $Y = 343874,057 + 0,469$. Untuk hasil nilai statistik t_{hitung} sebesar 2,927 (lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,039) mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,06 lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel

dependen. Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,469) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,927 > 2,039$) maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Hasil analisis jalur (*analisis path*) menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke PAD (sebagai variabel intervening) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,479 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,871) \times (0,049) = 0,043$. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = $0,479 + 0,043 = 0,522$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel PAD dapat menjadi variabel *intervening* atau PAD dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Selain itu dapat dilihat dari nilai t_{hitung} 0,341188798 lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,043 tidak signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi.

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur (*analisis path*) yang menyatakan bahwa nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel PAD dapat menjadi variabel *intervening* atau PAD dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Akan tetapi setelah dilakukan uji sobel test nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih kecil dari t_{tabel} . Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui PAD sebagai variabel *intervening*.

Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktifitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Variabel PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dengan bertambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pembangunan infrastruktur itu juga harus seimbang dengan penambahan penduduk. Adanya peningkatan pendapatan asli daerah ini akan memberikan dampak pada peningkatan pengeluaran belanja modal. Karena semakin banyak jumlah penduduk

disuatu daerah maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Namun, pada penelitian ini PAD tidak dapat memediasi antara jumlah penduduk dengan belanja modal, artinya pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan tidak selalu dilihat dari sisi banyak jumlah penduduk, akan tetapi dari sisi lain diluar penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga akan semakin besar.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan tabel IV.16 dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu, $Y = 122252,785 + 0,452X$. Untuk hasil nilai statistik t_{hitung} sebesar 4,250 (lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,039) mengindikasikan bahwa DAU berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,452) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,250 > 2,039$) maka dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menyatakan

bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2011) yang menyatakan bahwa secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke DAU (sebagai variabel intervening) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah -0,292 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,927) \times (0,877) = 1,804$. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih kecil dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan tidak langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = $-0,292 + 1,804 = 1,512$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAU dapat menjadi variabel *intervening* atau DAU dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Selain itu dapat dilihat dari hasil uji sobel test nilai $t_{hitung} = 12,12052983$ lebih besar dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 1,804 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi.

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur (*analysis path*) yang menyatakan bahwa nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAU dapat menjadi variabel *intervening* atau DAU dapat

memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Dalam hal ini nilai total pengaruh $1,512 >$ pengaruh langsung $0,292$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal melalui DAU sebagai variabel intervening.

Artinya DAU yang diterima oleh Pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan dari pemerintah pusat tidak selalu dilihat dari sisi jumlah penduduk suatu daerah, akan tetapi dari sisi lain seperti luas wilayah, keadaan geografis, struktur ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal.

Pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan Dana Alokasi Umum tertinggi tahun 2012-2014 adalah Kota Palembang. Tingginya Dana Alokasi Umum disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan lain berupa Dana Alokasi Umum yang diterima. Sebenarnya pemerintah daerah dapat meminimalisir celah tersebut apabila pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya salah satunya melalui pendapatan asli daerah.

DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Dengan adanya transfer pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan tabel IV.17 dapat dibuat suatu persamaan regresi yaitu $Y = 259628,512 + 2,204X$. Untuk nilai statistik t_{hitung} sebesar 2,422 (lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,039) mengindikasikan bahwa DAK berpengaruh dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien regresi (2,204) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,422 > 2,039) maka dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh

dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke DAK (sebagai variabel *intervening*) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,451 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalihkan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,243) \times (0,290) = 0,070$. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = $0,451 + 0,070 = 0,521$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAK dapat menjadi variabel *intervening* atau DAK dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur (*analisis path*) yang menyatakan bahwa nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAK dapat menjadi variabel *intervening* atau DAK dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Dalam hal ini nilai total pengaruh $0,521 >$ pengaruh langsung $0,451$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja

modal melalui DAK sebagai variabel intervening. Selain itu dapat dilihat dari hasil uji sobel test nilai $t_{hitung} = 2,307458722$ lebih besar dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,070 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi.

Artinya banyaknya jumlah penduduk daerah provinsi Sumatera Selatan dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah dalam hal belanja modal. Pengeluaran tersebut dikeluarkan dengan diterimanya Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat. Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang mempengaruhi alokasi belanja modal, Pemda juga mengandalkan DAK sebagai salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antrabidang.

Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan daerah. DAK bersifat *special grant*, dimana peruntukannya untuk pembangunan yang

sudah ditentukan dari pusat, sehingga realisasinya merupakan realisasi belanja modal.

Hubungan antara DAK dengan Belanja Modal memang cukup erat, hal ini dapat dijelaskan bahwa tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu untuk program kesehatan berupa pelayanan dasar di daerah, Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana puskesmas di daerah-daerah terpencil atau daerah plosok. Program nasional Pemerintah Daerah tersebut termasuk dalam anggaran Belanja Modal. Sehingga ada keterkaitan DAK yang diperoleh tersebut ditujukan untuk program nasional yang merupakan belanja pegawai juga. Setiap daerah berhak menggunakan seberapa banyak Dana Alokasi Khususnya digunakan sesuai dengan porsi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerahnya sendiri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan PAD tidak dapat menjadi variabel intervening antara jumlah penduduk terhadap alokasi belanja modal. Dan hasil pengujian yang telah dilakukan adalah jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui PAD sebagai variabel intervening.
3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan DAU dapat menjadi variabel intervening antara jumlah penduduk terhadap alokasi belanja modal. Dan hasil pengujian yang

telah dilakukan adalah jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui DAU sebagai variabel intervening.

4. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan DAK dapat menjadi variabel intervening antara jumlah penduduk terhadap alokasi belanja modal. Dan hasil pengujian yang telah dilakukan adalah jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui DAK sebagai variabel intervening.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan alokasi belanja modal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mempertimbangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan jumlah penduduk.
2. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti menambah variabel yaitu indeks pembangunan manusia, luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi agar hasilnya lebih baik dari penelitian yang sekarang yang dilakukan penulis.

Daftar Pustaka

- Asmuruf, dkk. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong.
(<http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses tanggal 5 Desember 2016)
- Aziz dan Ririn Wulandari. (2013). Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit, dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik terhadap Belanja Modal Daerah.
(www.digilib.mecubuana.ac.id diakses tanggal 27 November 2016)
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2010). *Indikator Ekonomi Kota Palembang Tahun 2010*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. (<http://www.djpk.depkeu.go.id> diakses tanggal 4 Desember 2016)
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Cetakan ke-7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
(<http://eprints.ums.ac.id/32015/9/02.%20Naskah%20Publikasi.pdf> diakses tanggal 2 februari 2017)
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Yogyakarta: ANDI.
- Mathius Tandiotong. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Meianto, dkk. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
(diakses tanggal 20 November 2016)

- Nuryaman dan Veronica Christina. (2015). *Metode Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pardede dan Rehard Manurung. (2014). *Analisis Jalur (Path Analysis)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*. Jakarta. Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah No. 104 Tentang Dana Perimbangan*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Siregar, Dr. Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan Belas. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj> diakses tanggal 20 November 2016)
- Widiagma, Aditya Putra. (2015). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (www.repository.unej.ac.id diakses tanggal 27 November 2016)

BIODATA PENULIS

Nama : **Pertamaya Sari**
NIM : **22 2013 173**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan : **Akuntansi**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Tempat, tanggal lahir : **Kayu Agung, 1 Agustus 1995**
Alamat : **PT. Wahyuni Mandira Kec. Sungai Menang
Kab.OKI**
Telephone : **081274210801**
Email : **pertamayasari@yahoo.com**
Nama Orang Tua :
 Ayah : **Ali Bundan**
 Ibu : **Baiti Yuliana**
Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : **Wiraswasta**
 Ibu : **Ibu Rumah Tangga**
Alamat orang tua : **PT. Wahyuni Mandira Kec. Sungai Menang
Kab.OKI**



GALERI INVESTASI
BURSA EFEK INDONESIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Jln. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 – 513022 Fax. 0711 - 513078

Nomor : 66 /R-60/GI.BEI UMP/II/2017
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Riset**

Palembang, 12 Jumadil Awal 1438 H
09 Februari 2017 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi UMP
di-
Palembang

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Ba'da salam semoga Allah SWT selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amiin.

Kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang bahwa mahasiswa di bawah ini dengan:

Nama : Pertamaya Sari
NIM : 22 2013 173
Jurusan : Akuntansi

Telah melakukan pengambilan data di Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id dan diketahui oleh pojok Bursa Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Wasalamu'alaikum, wr, wb.

Mengetahui,
Ketua Galeri Investasi BEI UMP


Eryita Safitri, S.E., M.Si.
NIDN : 0225126801

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami



Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

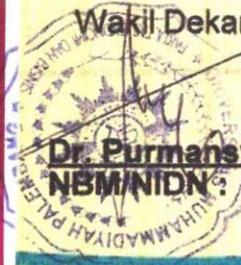
DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : PERTAMAYA SARI
NIM : 222013173
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Rabu, 24 Agustus, 2016
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126902



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Pertamaya Sari
Place/Date of Birth : Kayu Agung, August 01st 1995
Test Times Taken : +3
Test Date : February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 43
Structure Grammar : 37
Reading Comprehension : 40
OVERALL SCORE : 400

Palembang, February, 06th 2017
Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 476/TEA FE/LB/UMP/II/2017



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Pertamaya Sari	PEMBIMBING :
NIM : 222013173	KETUA : Drs. Sunardi, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	22-2-2017	Bab I. II, III			Pabur
2.	4-2-2017	Bab I. II, III			Aee
3.	5-2-2017	Bab IV			Pabur
4.	7-2-2017	Bab IV-			Pabur
5.	8-2-2017	Bab IV			Pabur
6.	9-2-2017	Bab IV. V			Aee
7.		Abstrak dan			Aee
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /



Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si., CA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/ I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /SI/ I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015 (B)

Website : fe.um Palembang.ac.id

Email : febumplg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2017
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Pertama Sari
Nim : 222013173
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

**TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Pembimbing	13-03-2017	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	13-03-2017	
3	Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA	Penguji I	13/3-2017	
4	Welly, S.E, M.Si	Penguji II	11 Mar 2017	

Palembang, Maret 2017

Dekan

u.d Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA

NIDN/NBM:0216106902/944806

B E R I T A A C A R A

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ketua Penguji : SUNARDI, DRS, S.E, M.SI
 2. Anggota Penguji 1 : BETRI, S.E, M.SI, AK
 3. Anggota Penguji 2 : WELLY, S.E., M.SI

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ujian komprehensif / tugas akhir yang diseleenggarakan pada :

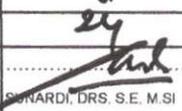
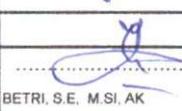
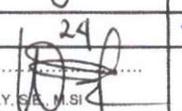
Hari : Senin
 Tanggal : 27 Februari 2017
 Pukul : 08:00-12:00 WIB
 Ruangan :

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas nama mahasiswa :

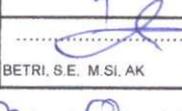
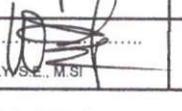
Nama : PERTAMAYA SARI
 Nomor Pokok : 222013173
 Bidang Tugas Akhir : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/ KOTA PALEMBANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dinyatakan ~~LULUS~~ / ~~TIDAK LULUS~~

I. PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIP

No.	Aspek yang dinilai	Nilai			Jumlah
		Ketua Penguji	Anggota Penguji 1	Anggota Penguji 2	
1	Penguasaan Skripsi	8	8	8	
2	Penguasaan materi	8	8	8	
3	Cara Mengemukakan Pendapat	8	8	8	
	Total Penilaian	24	24	24	72
	Tanda Tangan>Nama Terang	 SUNARDI, DRS, S.E, M.SI	 BETRI, S.E, M.SI, AK	 WELLY, S.E., M.SI	

II. PENILAIAN SKRIPSI

No.	Aspek yang dinilai	Nilai			Jumlah
		Ketua Penguji	Anggota Penguji 1	Anggota Penguji 2	
1	Kesesuaian antara perumusan masalah, analisis & kesimpulan	8	8	8	
2	Metodologi/Analisis pemecahan masalah	8	8	8	
3	Teknik Penulisan	8	8	8	
	Total Penilaian	24	24	24	72
	Tanda Tangan>Nama Terang	 SUNARDI, DRS, S.E, M.SI	 BETRI, S.E, M.SI, AK	 WELLY, S.E., M.SI	

Total Nilai Komprehensif : 72 [A], [B], [C], [TL]

Total Nilai Skripsi : 72 [A], [B], [C], [TL]

Catatan :

- A= 72 - 90
 B= 54 - 71
 C= 36 - 53
 < 35 TIDAK LULUS

Palembang, 27 Februari 2017
 Ketua Penguji,


 SUNARDI, DRS, S.E, M.SI

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	121120.27450673
	Absolute	.150
Most Extreme Differences	Positive	.150
	Negative	-.103
Kolmogorov-Smirnov Z		.859
Asymp. Sig. (2-tailed)		.451

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penduduk	33	208893	1558491	578747.79	360617.350
PAD	33	21467	734219	117397.33	162680.084
DAU	33	274671	1203662	612522.70	220285.169
DAK	33	9266	147190	63219.94	29689.592
Belanja Modal	33	162347	819081	398949.27	163997.807
Valid N (listwise)	33				

Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871 ^a	.758	.750	81262.316

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	642163433815.880	1	642163433815.880	97.245	.000 ^b
	Residual	204710482357.453	31	6603563947.015		
	Total	846873916173.333	32			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-109950.345	27048.493		-4.065	.000
	Jumlah Penduduk	.393	.040	.871	9.861	.000

a. Dependent Variable: PAD

Jumlah Penduduk Terhadap DAU

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.859	.854	84166.785

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1333212299385.975	1	1333212299385.975	188.199	.000 ^b
	Residual	219605479362.994	31	7084047721.387		
	Total	1552817778748.970	32			

a. Dependent Variable: DAU

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	284942.686	28015.257		10.171	.000
	Jumlah Penduduk	.566	.041	.927	13.719	.000

a. Dependent Variable: DAU

Jumlah Penduduk Terhadap DAK

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.243 ^a	.059	.028	29263.890

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1659467052.697	1	1659467052.697	1.938	.174 ^b
	Residual	26547632389.182	31	856375238.361		
	Total	28207099441.879	32			

a. Dependent Variable: DAK

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51662.755	9740.605		5.304	.000
	Jumlah Penduduk	.020	.014	.243	1.392	.174

a. Dependent Variable: DAK

Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.521 ^a	.271	.248	142227.884

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	233557085168.261	1	233557085168.261	11.546	.002 ^b
Residual	627091900402.285	31	20228770980.719		
Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	261840.810	47341.131		5.531	.000
	Jumlah Penduduk	.237	.070	.521	3.398	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.521 ^a	.272	.223	144522.329

a. Predictors: (Constant), PAD, Jumlah Penduduk

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	234047874263.436	2	117023937131.718	5.603	.009 ^b
Residual	626601111307.110	30	20886703710.237		
Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), PAD, Jumlah Penduduk

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	267224.425	59561.148		4.487	.000
Jumlah Penduduk	.218	.144	.479	1.511	.141
PAD	.049	.319	.049	.153	.879

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui DAU

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.380	.339	133341.292

a. Predictors: (Constant), DAU, Jumlah Penduduk

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	327251981122.359	2	163625990561.179	9.203	.001 ^b
Residual	533397004448.186	30	17779900148.273		
Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, Jumlah Penduduk

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	75720.446	92430.709		.819	.419
1 Jumlah Penduduk	-.133	.174	-.292	-.764	.451
DAU	.653	.285	.877	2.296	.029

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui DAK

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.350	.307	136520.599

a. Predictors: (Constant), DAK, Jumlah Penduduk

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	301512765442.385	2	150756382721.193	8.089	.002 ^b
Residual	559136220128.160	30	18637874004.272		
Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, Jumlah Penduduk

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	179184.209	62759.341		2.855	.008
1 Jumlah Penduduk	.205	.069	.451	2.971	.006
DAK	1.600	.838	.290	1.909	.066

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Regression PAD ke Belanja Modal

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465 ^a	.217	.191	147480.166

a. Predictors: (Constant), PAD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	186386605672.339	1	186386605672.339	8.569	.006 ^b
	Residual	674262379898.206	31	21750399351.555		
	Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	343874.057	31828.788		10.804	.000
	PAD	.469	.160	.465	2.927	.006

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Regression DAU ke Belanja Modal

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 ^a	.368	.348	132443.209

a. Predictors: (Constant), DAU

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	316871672227.014	1	316871672227.014	18.064	.000 ^b
	Residual	543777313343.532	31	17541203656.243		
	Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	122252.785	69063.517		1.770	.087
	DAU	.452	.106	.607	4.250	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Regression DAK ke Belanja Modal

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.399 ^a	.159	.132	152787.135

a. Predictors: (Constant), DAK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136987820066.929	1	136987820066.929	5.868	.021 ^b
	Residual	723661165503.617	31	23343908564.633		
	Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	259628.512	63364.578		4.097	.000
	DAK	2.204	.910	.399	2.422	.021

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Daftar Data Jumlah Penduduk, PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal tahun 2012-2014

(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah Penduduk	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
	2012	543349	73018	537624	59288	447716
Musi rawas	2013	551500	75367	635201	97938	564542
	2014	378987	120153	420562	82831	413464
	2012	208893	38256	328282	31060	162347
Lubuk Linggau	2013	213000	41693	377967	31335	282058
	2014	216270	50181	414758	44038	295111
	2012	230159	21467	274671	42325	177210
Empat Lawang	2013	231700	24230	308418	54003	245491
	2014	234880	32656	360872	62879	365015
	2012	382785	70938	516937	58371	240108
Lahat	2013	384600	78313	566788	66064	409290
	2014	389034	125319	615240	82832	369550
	2012	782220	67767	651358	97453	337733
Banyuasin	2013	788286	81364	772464	147190	561773
	2014	799998	106918	824219	112268	653603
	2012	338369	41429	456823	15199	221203
OKU	2013	342376	44680	517310	20890	341065
	2014	344932	79344	568771	9266	290864
	2012	628827	34834	541449	48171	165289
OKU Timur	2013	634700	36918	680714	67063	252320
	2014	642206	62418	680714	67063	238864
	2012	752906	54618	743453	82722	381294
OKI	2013	764894	68701	844191	110790	481992
	2014	776263	145591	931159	88871	444998
	2012	392989	31742	446519	49789	320696
OI	2013	398275	22080	520288	78045	463615
	2014	403828	49061	561377	74131	334233
	2012	572000	119456	580314	45219	555453
Muara Enim	2013	581600	125111	678488	46528	819081
	2014	590975	138706	593564	59604	634279
	2012	1503485	518859	934084	36499	397764
Palembang	2013	1535900	558705	1125008	66991	678418
	2014	1558491	734219	1203662	49542	618887

Sumber : Data Diolah, 2017